



**Implementasi Kebijakan  
Peraturan Internal Rumah Sakit  
(*Hospital By Laws*)**

**Di Rsud Prof.Dr.M.Ali Hanafiah Sm Batusangkar  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2013**

**Indra Darmanto  
Dumilah Ayuningtyas  
Disampaikan pada Forum Nasional IV  
Jaringan Kebijakan Kesehatan  
Kupang, 4 September 2013**



# LATAR BELAKANG (1)

- Hasil prariset
  - belum diketahuinya jumlah rumah sakit yang telah menjalankan kebijakan HBL (Kemenkes dan Dinkes Provinsi Sumbar)
  - peraturan dan dokumen kebijakan yang ada belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah (Direktur dan Kabid Pelayanan RSUD Prof.dr.M.A.Hanafiah SM Batusangkar)



## LATAR BELAKANG (2)

- implementasi kebijakan Peraturan Internal Rumah Sakit (HIR) belum berjalan secara optimal.
- mengkaji lebih dalam penyebab belum terlaksananya kebijakan tersebut dilihat dari beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi



# RUMUSAN MASALAH

- RSUD belum memiliki Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL sehingga proses implementasi kebijakan belum terlaksana secara optimal.
- lemahnya perlindungan hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit manakala rumah sakit terlibat konflik hukum



# **PERTANYAAN PENELITIAN**

- Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL) ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dan perspektif hukum normatif di RSUD Prof.Dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar Provinsi Sumatera Barat tahun 2013?



# TUJUAN

Umum

- untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan HBL,
- mengidentifikasi aspek hukum normatif di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar tahun 2013



# TUJUAN

## Khusus

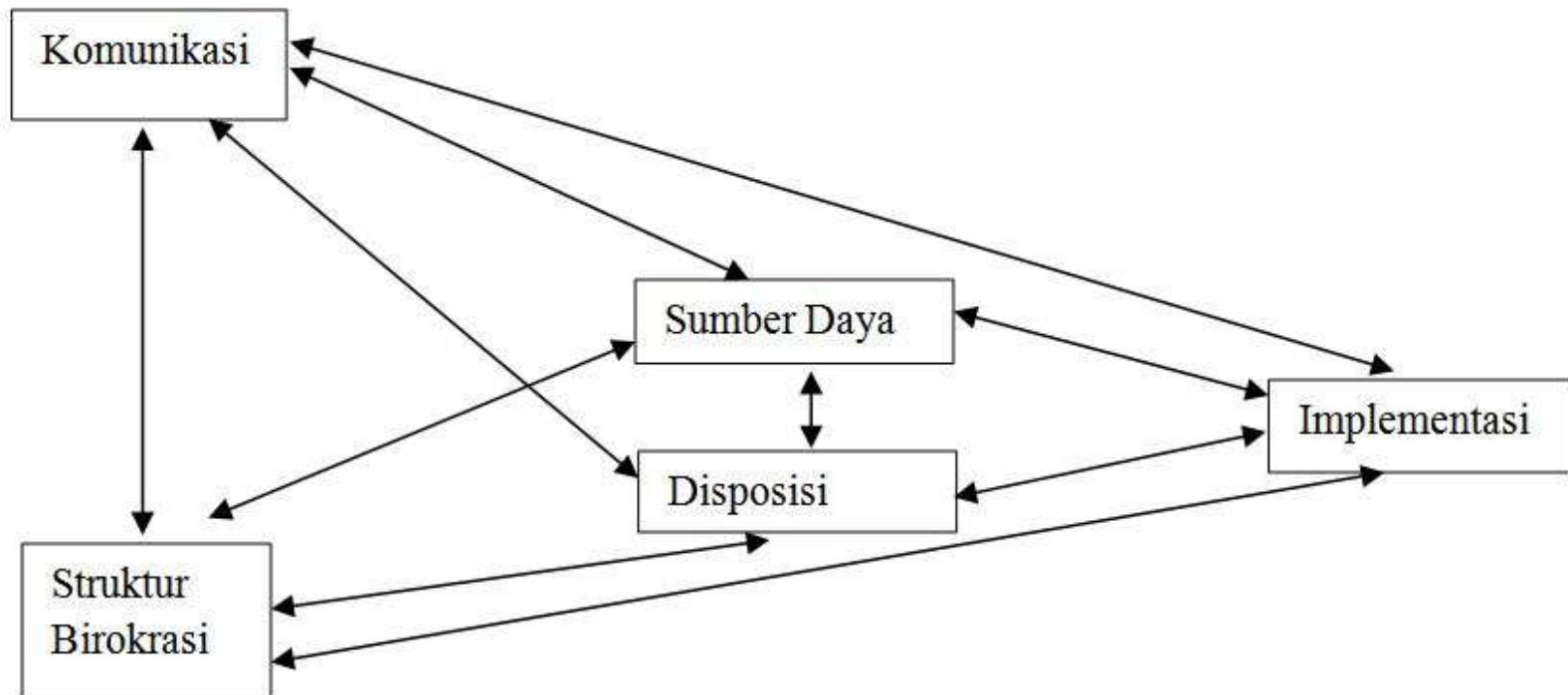
Memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi kebijakan kesehatan HBL

Memperoleh informasi mendalam mengenai faktor komunikasi, sumber daya organisasi, disposisi, dan struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan kesehatan

Mengidentifikasi perspektif hukum melalui pendekatan hukum normatif kebijakan terkait rumah sakit dan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan HBL

# KERANGKA TEORI & KONSEP

Gambar 3.1 :  
Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan  
(Teori Edward III).

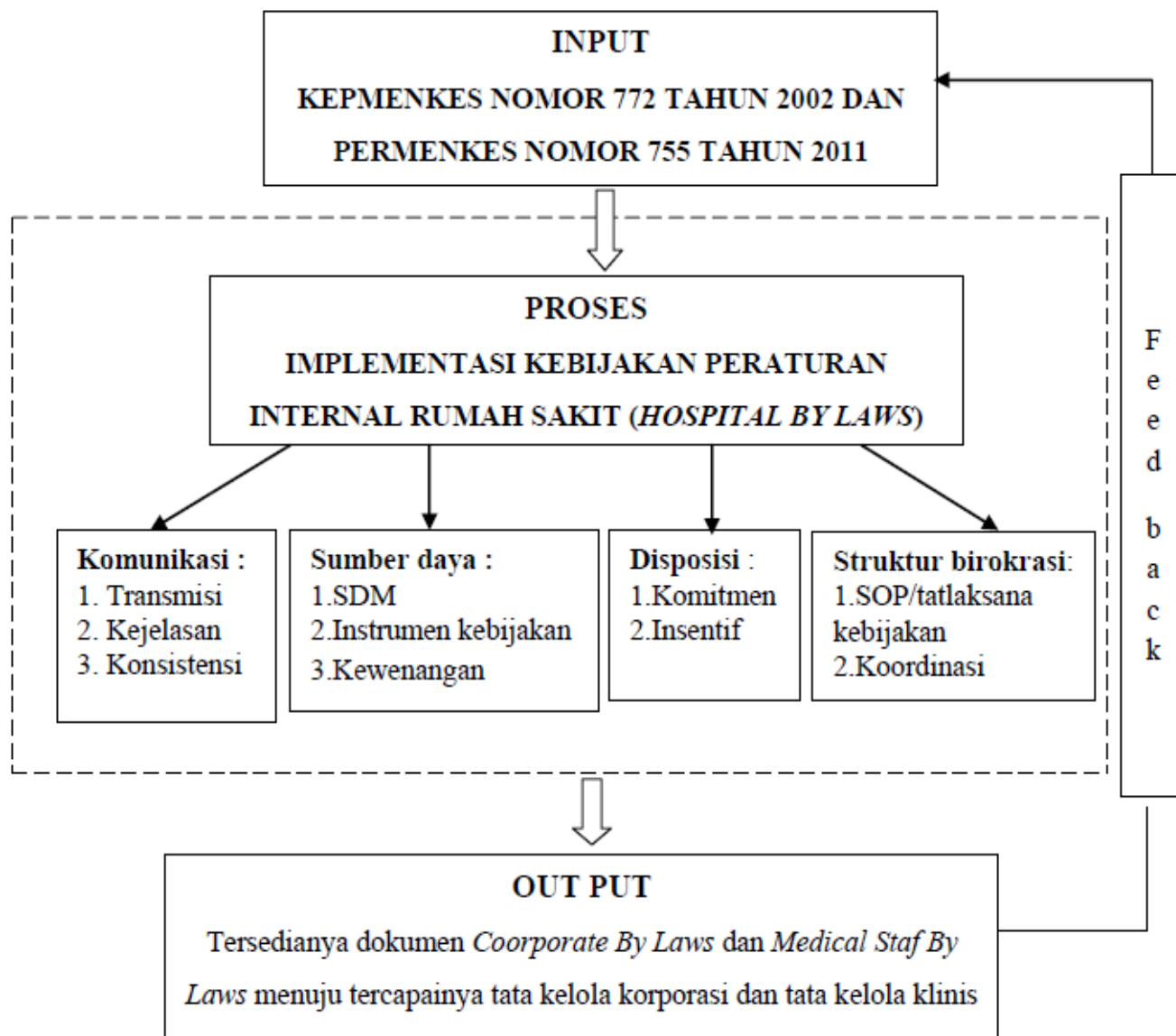


Sumber : George III Edward ; *Implemeting Public Policy*, 1980 dikutip dari (Nawawi, 2009) dan (Nugroho, 2011).





Gambar 3.2  
Kerangka Konsep Penelitian





# METODE PENELITIAN

**desain**

- kualitatif retrospektif,
- Wawancara mendalam

**Waktu dan lokasi**

- Februari-Maret 2013
- RSUD Prof.dr.M.A.Hanafiah SM Batusangkar Sumatera Barat

**Pengumpulan data**

- Primer
- sekunder

**informan**

- Unsur pemilik
- pengelola
- Staf medik
- Triangulasi metode

**Validasi data**

- Triangulasi data
- Triangulasi sumber

**Pengolahan data**

- Transkrip hasil rekaman
- Reduksi dengan abstraksi data

**Analisis data**

- Dalam bentuk matriks
- dikaitkan



# HASIL PENELITIAN

## ➤ Pelaksanaan Penelitian :

- persiapan perijinan,
- Telaah dokumen,
- wawancara,
- langkah-langkah validasi data, pengolahan data, analisis data
- kesimpulan, saran ataupun rekomendasi.

## ➤ karakteristik informan : 11 orang dari unsur pemilik, pengelola, dan staf medik, dengan instansi, jabatan, umur, pendidikan, dan masa jabatan yg berbeda.



# HASIL ANALISIS KEBIJAKAN

## aktor

- sebagian besar belum mengetahui apa perannya dalam menyusun dan melaksanakan HBL

## konten

- sebagian besar masih merupakan prakiraan, karena masih banyak informan yang tidak mengetahui, belum melihat dan membacanya

## konteks

- pengaruh desentralisasi lebih dominan

## proses

- dokumentasi belum ada, kecuali draft penyusunan HBL th 2003



# HASIL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- Komunikasi
  - Transmisi : sosialisasi kebijakan HBL belum berjalan
  - Kejelasan : tidak mengetahui tentang kebijakan HBL dan implementasinya
  - Konsistensi : masing-masing memiliki persepsi berbeda (antara pemilik, pengelola, dan staf) tentang HBL



## HASIL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (2)

- Sumber Daya
  - Sumber Daya Manusia : kualitas dan kuantitas mempengaruhi implementasi kebijakan
  - Instrumen kebijakan : sebagian besar berupa Surat Edaran
  - Kewenangan : hanya bersumber pada perda tentang BLUD,



## HASIL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (3)

- Disposisi
  - Komitmen : belum terlihat nyata tidak sesuai dengan pernyataan,
  - Insentif/dana : belum ada alokasi anggaran, reward dan punishment belum berjalan,
- Struktur birokrasi
  - SOP : tidak ada dokumen HBL, 282 SOP (kualitas dan ketersediaan di tiap unit pelayanan kurang)
  - Koordinasi : berjalan baik (menurut pemilik dan pengelola), kurang (oleh staf medik)



# PEMBAHASAN

## Analisis kebijakan HBL

- A. Aktor : Pemilik belum tahu , pengelola dan staf medik menjawab “sebagai pelaksana “.
- B. Konten : hanya sebagian kecil informan yang pernah melihat dan membaca Kebijakan HBL
- C. Konteks : faktor sistem desentralisasi >>> berpengaruh. >>>peraturan mengacu pada Perda. Meskipun secara sadar akan pentingnya HBL, namun belum menjadi prioritas.





## PEMBAHASAN (2)

### D. Proses :

- tidak berlanjutnya proses penyusunan di th 2003, disebabkan oleh telah berakhirnya penilaian akreditasi.
- Proses transmisi : kebijakan dari Kemenkes, berhenti di pengelola RS karena tidak adanya dukungan dari pemda
- Komite medik tidak bisa melaksanakan proses pembuatan HBL karena tidak didukung oleh pengelola RS



## Faktor yg mempengaruhi :

- **Komunikasi** : terputusnya komunikasi antara Kemkes, RS, Pemilik, dan staf medis.
  - Transmisi : >>> rapat, topik >>>perda, sosialisasi HBL belum pernah.
  - Kejelasan : pedoman sudah ada, namun karena belum pernah membaca, tentunya belum jelas.
  - Konsistensi : pengakuan HBL urgen, namun implementasi belum. HBL hanya sebagai prasyarat akreditasi.



# Faktor yg mempengaruhi :

- **Sumber daya**

- SDM : tidak ada yang mempunyai kompetensi hukum atau hukum kesehatan
- Instrumen kebijakan : kemenkes 772/2002 dan Permenkes 755/2011
- Kewenangan : Belum dibentuk tim yang menyusun dan melaksanakan HBL



# Faktor yg mempengaruhi :

- **Disposisi**

- Komitmen : dg belum tersedianya dokumen HBL sesuai dg instrumen kebijakan menandakan komitmen implementor belum terbentuk
- Insentif : belum ada dana dalam perencanaan



# Faktor yg mempengaruhi :

- **Struktur Birokrasi**

- SOP : semua SOP yang ada termasuk di dalam dokumen BLUD yang seharusnya SOP tsb mengacu kpd HBL krn sama2 bersifat teknis
- Koordinasi : koordinasi antar lembaga belum terbentuk disebabkan belum tersedianya dokumen HBL



- Tinjauan normatif kebijakan HBL

UUD 1945

Landasan dasar dari semua peraturan



UU No. 44 Th. 2009

Pasal 29 ayat 1 & ayat 2



Kepmenkes 772/2002 & Permenkes 755/2011

Pedoman pembuatan HBL

Penyelenggaraan komite medik



# KESIMPULAN

- **Kesimpulan :**
  - Komunikasi kebijakan HBL belum berjalan karena belum ada sosialisasi, perbedaan persepsi, dan pemahaman anta aktor tentang kebijakan HBL, serta anggapan yang menyatakan kebijakan hBL adalah kebijakan teknis
  - Ketersediaan sumber daya dalam implementasi HBL sangat kurang karena tidak ada SDM dengan latar pendidikan Hukum/Hukum Kesehatan, instrumen kebijakan belum didistribusikan, serta ketidakjelasan pembagian wewenang
  - Tidak ada upaya konkret sebagai wujud komitmen pengelola rumah sakit untuk implementasi kebijakan HBL
  - Struktur birokrasi tidak mencerminkan implementasi HBL (ex: tidak ada dewan pengawas) dan menimbulkan keraguan dalam proses koordinasi



# SARAN

- **Kementerian Kesehatan :**

- meningkatkan sosialisasi scr komperhensif untuk semua RS
- Meningkatkan upaya penegakan hukum
- Meningkatkan kajian ilmiah dari segi hukum penyelenggaraan RS
- Meningkatkan upaya menumbuhkan komitmen dari penyelenggara RS agar taat hukum

- **Rumah Sakit**

- Perlunya mensosialisasikan kebijakan HBL pd pemilik dan setiap lapisan organisasi di RS
- Meningkatkan komitmen birokrasi,
- Mebuat perencanaan yg mengakomodir HBL





# SARAN (2)

- **Pemda**

- Perlunya mensinergikan kebijakan yg turun dari kemendagri dg kemkes
- Menjalankan fungsi pemilik sesuai regulasi yg telah ditetapkan
- Meningkatkan komitmen utk membuat suatu kebijakan daerah berupa HBL



## SARAN (3)

- **Peneliti lain**

- Melakukan kajian lebih lanjut mengenai HBL dg segala aspek implementasinya
- Melakukan kajian hukum yuridis normatif yang lebih besar thd kebijakan HBL di bbrp RS yg ada di Indonesia
- Melakukan kajian thd tk. Kepatuhan RS dlm menyusun dan melaksanakan HBL
- Melakukan kajian lebih dalam mengenai upaya penegakan hukum dalam dunia kesehatan di Indonesia



***TERIMA KASIH***